

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Guna menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi diperlukan Rencana Strategis ( Renstra ). Renstra merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit Kerja Pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

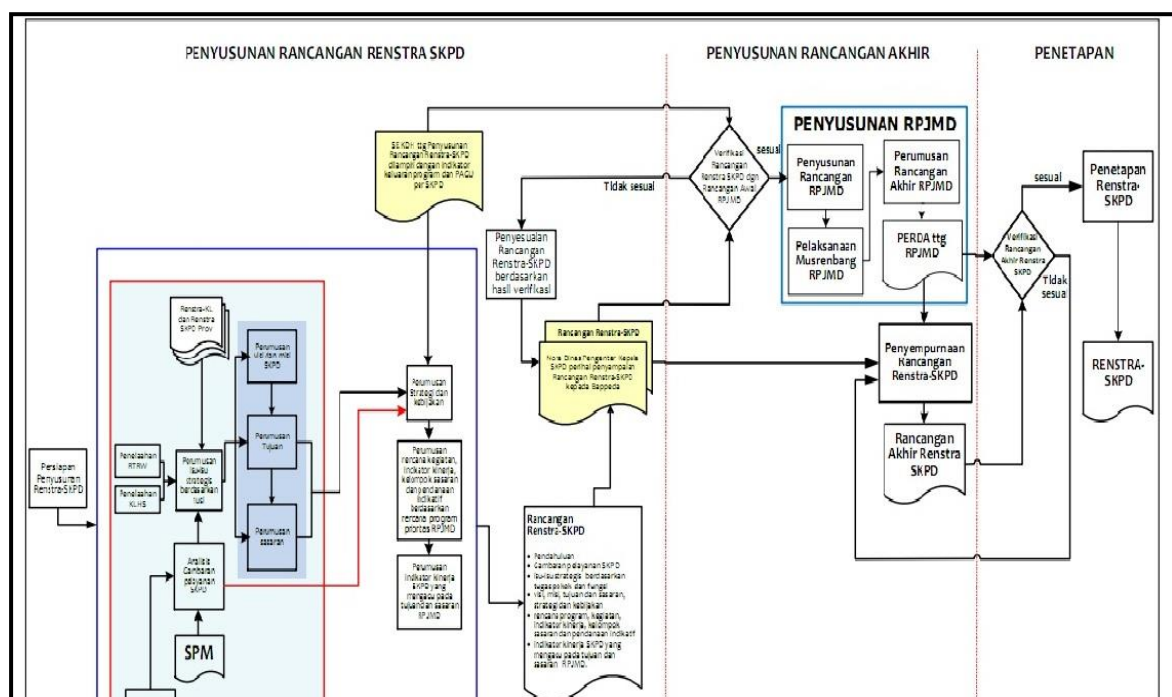
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pelayanan DPMD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang memiliki fungsi diantaranya :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan Visi, Misi dan Tupoksi DPMD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitasnya,
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan DPMD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat,
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh DPMD,
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DPMD,
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme serta menginformasikan perubahan arah pembangunan apabila diperlukan,
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan,
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah – langkah yang jelas untuk mencapai tujuan,
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DPMD.

Proses penyusunan Renstra DPMD melalui 3 pilar yaitu: Alur proses teknoratis – strategis, Alur proses partisipatif dan Alur proses politislegislasi. Alur tersebut disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

**Gambar 1.1**  
**PROSES PENYUSUNAN RENSTRA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SAMPANG**



Renstra DPMD dan RPJMD mempunyai keterkaitan karena merupakan

tolak ukur terhadap pencapaian sasaran selama 5 (Lima) tahun kedepan, dengan Renstra K/L juga mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh DPMD yaitu :

- Masih tingginya angka kemiskinan
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Masih rendahnya pelaku pemberdayaan di kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa
- Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan pemanfaatan potensi lokal.
- Serta mengatur dan membina tata kelola pemerintahan desa

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum utama yang terkait dengan Pedoman Perencanaan dan penganggaran, TUPOKSI dan Kewenangan DPMD yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk merumuskan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 serta pelaksanaan unsur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup TUPOKSI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, yaitu:

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desa
2. merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat
3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna
4. Melakukan pengorganisasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
6. Pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

BABI : PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Fungsi Renstra DPMD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses

penyusunan Renstra DPMD, Keterkaitan Renstra DPMD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja DPMD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan DPMD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra DPMD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMD, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMD, Struktur Organisasi DPMD serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala DPMD. Uraian tentang Struktur Organisasi DPMD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, Jumlah personil dan tata laksana DPMD (proses, prosedur dan mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya DPMD

Memuat Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan DPMD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMD berdasarkan sasaran/target Renstra DPMD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan DPMD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD.

### BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi DPMD yang terkait dengan Visi, Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi

Mengemukakan faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan DPMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

#### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Memuat faktor - faktor dari pelayanan DPMD yang mempengaruhi permasalahan DPMD.

### BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

Memuat tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi dasar penyusunan kinerja DPMD selama lima tahun

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini menjelaskan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja DPMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sampang.

##### **a. Tugas Pokok**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

##### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **c. Struktur Organisasi**

###### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengedalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial)
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*)
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan usaha ekonomi, sarana prasarana dan teknologi tepat guna; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

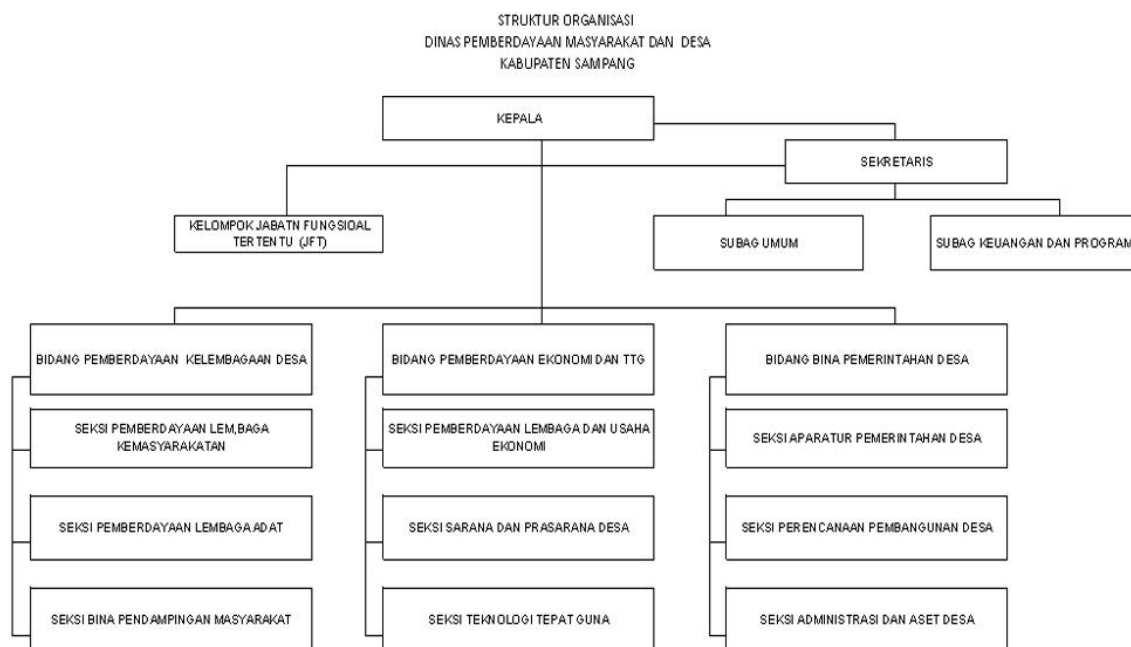
### **5. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan kepala desa dan aparat pemerintahan desa

- b. Penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SAMPANG**



## 2.2 Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki personel sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga Orang). Uraian jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**JUMLAH PNS DPMD KABUPATEN SAMPANG  
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IVc (Pembina Utama Muda)	1
2	Golongan IVb (Pembina Tk. I)	2
3	Golongan IVa (Pembina)	5
4	Golongan IIIId (Penata Tk. I)	7
5	Golongan IIIc (Penata)	1
6	Golongan IIIb (Penata Muda Tk.I)	7
7	Golongan IIIa (Penata Muda)	3
8	Golongan IIId (Pengatur Tk. I)	1
9	Golongan IIc (Pengatur)	3
10	Golongan IIb (Pengatur Muda Tk. I)	3
11	Golongan II (Pengatur Muda)	2
	<b>JUMLAH PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN</b>	<b>32</b>
	<b>JUMLAH PEGAWAI NON PNS</b>	<b>11</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PEGAWAI</b>	<b>43</b>

**Tabel 2.2**

**JUMLAH PEGAWAI DPMD KABUPATEN SAMPANG  
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JML	
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2		S-3
<b>1</b>	<b>Struktural</b>									
	1 Eselon	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2 Eselon	-	-	-	-	-	3	2	-	5
	3 Eselon	-	-	2	-	-	5	4	-	11
2	Staf PNS	-	-	7	-	2	10	2	-	21
3	Staf Non PNS	-	-	5	-	1	2	-	-	8
<b>4</b>	<b>Fungsional</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>0</b>
	<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>14</b>	-	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	-	<b>46</b>

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Tahun 2018 diperoleh dengan cara pembelian, transfer masuk, hibah dari SKPD lain maupun Pihak ke 3 yang diperoleh dari Tahun 1985 s/d Tahun 2018, tapi dari seluruh aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kondisinya tidak semua baik sebagian ada yang rusak ringan maupun berat

**Tabel 2.3**  
**ASET/MODAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kursi Lipat	Elephant	1985	Unit	7	4	0	3	4Di Ruang Kerja, 1 Ruang Ekonomi, 2 Ruang KD	Rp 1	3 buah proses mutasi
2	Kursi Ukir	-	1985	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	proses mutasi
3	Meja Kerja	-	1985	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
4	Rak Kayu	-	1985	Unit	2	0	2	0	Gudang	Rp 1	-
5	Kursi Putar	Indachit	1998	Unit	6	6	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
6	Kursi Rapat Plastik Putih	Foniture	1998	Buah	11	11	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
7	Kursi Besi Warna Hijau	Chitose	1999	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Kursi Kaki Besi Warna Hitam	-	1999	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
9	Kursi Kayu Warna Merah	-	1999	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
10	Lemari kayu 2 Kaca	-	1999	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
11	Kursi besi Warna Hitam Kecil	-	2000	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	proses mutasi
12	Kursi Busa Warna Biru	-	2000	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
13	Meja Tamu Kaca	-	2000		1	0	0	1	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
14	Sofa Warna Hijau	-	2000	Unit	1	0	0	1	Ruang Sekretaris	Rp 1	proses mutasi
15	Kursi Tamu	-	2001	Unit	4	4	0	0	Ruang Tamu	Rp 1	-
16	Meja Tamu	-	2001		1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 1	-



NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Almari F.K	Brother	2002	Unit	2	2	0	0	1 Ada di ruang sekretariat, 1 Ada di Ruang Kerja tengah	Rp 1	-
18	Almari F.K ( 2 Pintu )	Brother	2002	Unit	2	2	0	0	1 Ada di Ruang KD, 1 Ada di Gudang	Rp 1	-
19	Filling Besi/Metal	Data Strip	2002	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 1.000.000	-
20	Kursi Putar	-	2002	Unit	2	0	0	2	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.500.000	proses mutasi
21	Rak Besi/Metal	NCB7510	2002	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 200.000	-
22	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	2002	Unit	1	1	0	0	Solihin	Rp 1	-
23	Sepeda Motor	Honda C100ML	2002	Unit	1	1	0	0	Muamar	Rp 1	-
24	Sepeda Motor	Honda C100ML	2002	Unit	1	1	0	0	Poernomo, SE	Rp 1	-
25	Almari F.K	Brother	2003	Unit	6	5	1	0	3 Ada di ruang Kerja tengah, 1 Ada di Ruang SDA dan TTG, 2 Di gudang	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Kursi Rapat Plastik Putih	Tenmi Furniture	2003	Unit	20	20	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
27	Meja Kerja Warna Hitam	-	2003	Unit	3	3	0	0	1 Ada di ruang Sekretariat, 2 Ada di Ruang kerja	Rp 1	-
28	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Abdullah Ibnu Rasjid	Rp 1	-
29	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Mochamad Ali Yasak, S.sos	Rp 9.850.000	-
30	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Edy Firmansyah	Rp 9.850.000	-
31	Sepeda Motor	Suzuki FD 110X	2003	Unit	1	1	0	0	Sumiati	Rp 9.850.000	-
32	Sepeda Motor	Honda MCB 97 win	2003	Unit	1	1	0	0	Moh. Hairil Fadilah, SH	Rp 9.850.000	-
33	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Ummi Salamah, S.Sos	Rp 1	-
34	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Jufri, S.Pd, MM	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Slamet Ariyadi	Rp 9.850.000	-
36	Sepeda Motor	Honda C100ML	2003	Unit	1	1	0	0	Agus Sapto Utomo	Rp 9.850.000	Proses penghapusan
37	Sepeda Motor	Honda MCB 97 win	2003	Unit	1	1	0	0	Budi Hartono	Rp 9.850.000	-
38	Sepeda Motor	Kawasaki (Blitz)	2003	Unit	1	1	0	0	Bachtiar Agung Kusumajaya, SE	Rp 9.850.000	-
39	Meja Komputer	-	2004	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
40	Mobil	Toyota Kijang KF 80	2004	METER	1	1	0	0	Pool / Operasional	Rp 1	-
41	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	2004	Unit	1	1	0	0	Murdiono, SE,MM	Rp 1	-
42	Kursi Putar	-	2005		3	3	0	0	2 Ruang Kerja Tengah, 1 Ruang KD	Rp 1	-
43	Meja Kerja	-	2005	Unit	4	4	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Kursi Putar Besar	Rakuda	2006	Buah	1	0	1	0	SDA	Rp 1	-
45	Kursi Putar Kecil	Rakuda	2006	Unit	1	0	0	1	Ruang Sekretariat	Rp 1	proses mutasi
46	Lemari arsip	-	2006	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 1.500.000	-
47	Meja Kerja	-	2006	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 1	-
48	Meja Komputer	Kenko	2006	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
49	Meja Komputer	-	2006	Unit	2	2	0	0	1 Ruang Kerja Tengah, 1 Sekretariat	Rp 1	-
50	Mesin Ketik	Oliverti	2006		3	0	2	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	1 buah proses mutasi
51	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Unit	1	1	0	0	Ahmad Taufikurrahman	Rp 10.198.500	-
52	Sound System	Thunder	2006	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 4.350.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
53	komputer	HP	2007	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.500.000	proses mutasi
54	Komputer	LG	2007	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1	-
55	Kursi Kerja Roda Putar	-	2007	Buah	2	1	1	0	1 Ruang Kerja Tengah, 1 Aula	Rp 1.900.000	-
56	Kursi Putar	-	2007	Unit	4	4	0	0	Ruang Sekretaris, Ruang SDA dan TTG, Ruang Ekonomi, Ruang Kepala	Rp 1	-
57	Laptop	Acer	2007	SET	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 7.500.000	-
58	Meja Kerja	-	2007	Buah	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 1	-
59	Meja Kerja Kantor	-	2007	Buah	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 800.000	-
60	Proyektor	-	2007	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 10.000.000	-
61	Komputer	LG	2008	Buah	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 15.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
62	Kursi Kerja	-	2008	Unit	8	8	0	0	2 Ruang Sosbud, 1 Ruang Sekretariat, 1 Ruang Kerja Tengah, 4 Aula	Rp 2.650.000	-
63	Kursi Rapat Plastik Putih	Napollytop	2008	Unit	19	19	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
64	Lap.top	Toshiba	2008	Unit	1	1	0	0	Ruang Ekonomi	Rp 9.900.000	-
65	Meja Kerja	-	2008	Buah	3	3	0	0	1 Ruang Sekretariat, 2 Ruang Kerja Tengah	Rp 2.400.000	-
66	Sepeda Motor	Suzuki EN 125A	2008	Unit	1	1	0	0	Putut Tri Cahyoko, SE	Rp 14.850.000	-
67	A.C. Split	-	2009	Unit	3	2	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 14.250.000	-
68	Handycam	Sony	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 8.250.000	-
69	Jam Dinding	-	2009	Unit	2	2	0	0	Aula Bapemas dan Ruang Kepala	Rp 300.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
70	Kamera digital	Nikon	2009		1	0	0	1	Ruang Sekretariat	Rp 3.500.000	proses mutasi
71	komputer	-	2009	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 15.800.000	-
72	kursi kerja	-	2009	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.700.000	-
73	Lap.top	Toshiba	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 12.000.000	-
74	meja kerja	-	2009	Unit	3	3	0	0	2 Ruang tengah Kerja, 1 Aula	Rp 2.550.000	-
75	meja rapat	-	2009	Unit	12	12	0	0	Aula Bapemas	Rp 18.830.760	-
76	meja rapat	-	2009	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 1.569.240	-
77	Papan Kegiatan	-	2009	Buah	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 1	-
78	Printer	Epson	2009	Unit	2	0	0	2	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.000.000	proses mutasi

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
79	Printer	Epson	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.800.000	-
80	Rak Kayu	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.000.000	-
81	Sofa	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 5.000.000	-
82	Televisi	-	2009	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 1.500.000	-
83	AC UNIT	Sharp	2010	Unit	2	2	0	0	Aula Bapemas	Rp 9.750.000	-
84	AC UNIT	Toshiba	2010	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 27.650.000	-
85	INTERNET	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.000.000	-
86	KAMERA	-	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang SDA dan TTG	Rp 3.000.000	proses mutasi
87	KAMERA	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang KD	Rp 3.320.000	-
88	KARPET	-	2010	Unit	40	40	0	0	Kantor Bapemas	Rp 4.250.000	-
89	KARPET 5 METER	-	2010	Buah	5	5	0	0	Kantor Bapemas	Rp 1.450.000	-



NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
90	KOMPUTER 1 PAKET	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.500.000	-
91	KOMPUTER 1 UNIT	-	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.950.000	-
92	KORDEN	-	2010	Unit	75	75	0	0	Kantor Bapemas	Rp 17.625.000	proses mutasi
93	KURSI RAPAT	-	2010	Unit	5	5	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.875.000	-
94	Laptop	TOSHIBA	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang SDA dan TTG	Rp 10.000.000	-
95	Laptop	TOSHIBA	2010	Unit	2	2	0	0	Ruang Sosbud, Ruang KD	Rp 20.600.000	-
96	MEJA KERJA	-	2010	Unit	30	30	0	0	Ruang Kerja Ruang SDA dan TTG, Ruang Ekonomi, Ruang Sosbud, Ruang KD, Ruang Tamu	Rp 39.500.000	-
97	MEJA RAPAT	-	2010		1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 3.350.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
98	MESIN KETIK	OLIVERTI	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.750.000	-
99	MICROPHONE	-	2010	PAKET	3	3	0	0	Aula Bapemas	Rp 5.400.000	-
100	Mobil	Isuzu TBR 54 FH Panther Touring	2010	Unit	1	1	0	0	Drs. Mohammad Amiruddin	Rp 265.670.000	-
101	PARTISI	-	2010	Unit	140	140	0	0	Kantor Bapemas	Rp 62.650.000	-
102	PRINTER	HP	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.450.000	proses mutasi
103	PRINTER	Epson	2010	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.800.000	proses mutasi
104	PRINTER	Canon Pixma	2010	Unit	1	0	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.828.000	
105	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	2010	Unit	1	1	0	0	SUHANTO, SE	Rp 14.331.000	-
106	SOUND SYSTEM	-	2010	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 10.200.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
107	TELEVISI	TOSHIBA REGZA	2010	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.950.000	-
108	UPS	-	2010		1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 600.000	proses mutasi
109	WALLPAPER	-	2010		50	50	0	0	Kantor Bapemas	Rp 4.140.000	-
110	AC UNIT	Panasonic	2011		2	2	0	0	Ruang Sekretaris dan Ruang Kepala	Rp 9.000.000	-
111	KURSI RAPAT	CHITOSE	2011	Buah	56	56	0	0	Aula Bapemas	Rp 20.100.000	-
112	Laptop	ACER	2011	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 10.000.000	-
113	Papan Informasi, Data, Struktur	-	2011	Buah	1	1	0	0	Ruang Tamu, Ruang Kepala, Ruang Sekretaris	Rp 4.000.000	-
114	Tandon Air	-	2011	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 2.950.000	-
115	VACUM CLEANER	SANYO	2011		1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 3.025.000	-
116	AC UNIT	Toshiba	2012	Buah	1	0	1	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.750.000	proses mutasi

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
117	BRANKAS	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretariat	Rp 5.500.000	-
118	ETALASE	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 2.900.000	-
119	KARPET 4 METER X 4,6 METER	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.500.000	-
120	KELENGKAPAN KOMPUTER (MAINBOARD, HARDISK, POWER SUPPLY)	-	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 800.000	-
121	KIPAS ANGIN (BLOWER)	-	2012	Buah	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 900.000	-
122	KURSI HADAP PEJABAT ESELON III	-	2012	Unit	5	2	3	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.000.000	-
123	KURSI KERJA	-	2012		5	3	2	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.750.000	-
124	KURSI RAPAT	-	2012	METER	6	6	0	0	Ruang Kepala	Rp 4.500.000	-
125	Laptop	TOSHIBA	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 10.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
126	LEMARI FILING KABINET (KECIL)	DAINICHI	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.850.000	-
127	LEMARI FILING KABINET BESAR	BROTHER	2012	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 2.750.000	-
128	MEJA RAPAT	-	2012		1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 3.500.000	-
129	MESIN HITUNG	-	2012		2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 500.000	-
130	MIMBAR/PODIUM	-	2012	Buah	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 2.000.000	-
131	PAPAN/INFORMASI/DATA/BACA/NAMA	-	2012	Buah	4	4	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.000.000	-
132	PRINTER	EPSON	2012	Unit	1	0	0	1	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.500.000	-
133	TANGGA ALMINIUM	-	2012	Unit	1	1	0	0	Gudang Bapemas	Rp 1.600.000	-
134	AC	TCL	2013		2	2	0	0	Aula Bapemas	Rp 10.000.000	-
135	PENGADAAN KAMERA	SONY	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.475.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
136	PENGADAAN KURSI KERJA LIPAT	CHITOSE	2013	Unit	14	14	0	0	Aula Bapemas	Rp 6.230.000	-
137	PENGADAAN KURSI KERJA PUTAR	DAICHI	2013	Unit	10	10	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.400.000	-
138	PENGADAAN LAPTOP	ACER ASPIRE	2013	Unit	2	2	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 19.750.000	-
139	PENGADAAN MESIN FAXIMILI	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 3.730.000	-
140	PENGADAAN SOFA	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Sekretaris	Rp 3.285.000	-
141	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 635.000	-
142	PENGADAAN WEBSITE	-	2013	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 19.800.000	-
143	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PENGADAAN SEPEDA MOTOR	-	2013	Unit	1	1	0	0	-	Rp 1.600.000	-
144	Sepeda Motor	Honda Supra 125	2013	Unit	1	1	0	0	Drs. Moh. Wasaton Hadi, MM	Rp 16.000.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	NILAI	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
145	Sepeda Motor	Honda Supra 125	2013	Unit	1	1	0	0	Ir. Majid Syamroni, M.Si	Rp 16.000.000	-
146	AC	Honshu	2014	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 4.975.000	-
147	Komputer	LG	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.950.000	-
148	Kursi Kerja	DAINICHI	2014	Unit	8	8	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 7.000.000	-
149	Kursi Rapat	CHITOSE	2014	Unit	20	20	0	0	Aula Bapemas	Rp 7.000.000	-
150	Laptop	TOSHIBA	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.975.000	-
151	Laptop	ACER	2014	Unit	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 9.850.000	-
152	Monitor/ Display	LG	2014	Buah	1	1	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 1.450.000	-
153	Papan Informasi, Data, Nama, Baca	-	2014	Buah	1	1	0	0	Ruang Tamu	Rp 3.500.000	-

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
154	Printer	Canon Pixma	2014	Unit	3	3	0	0	Ruang Kerja Tengah	Rp 4.500.000	-
155	Proyektor	PANASONIC	2014	Unit	1	1	0	0	Aula Bapemas	Rp 7.425.000	-
156	AC	Panasonic	2015		1	1	0	0	Ruang kerja tengah	Rp 4.950.000	-
157	Filling Kabinet	Lion	2015		2	2	0	0	Ruang kerja kepala badan, Ruang kerja tengah	Rp 5.800.000	-
158	Laptop	ASUS	2015		2	2	0	0	Ruang kerja sekretariat	Rp 19.900.000	-
159	Lemari Arsip Sliding Kaca	Brother	2015		1	1	0	0	Ruang kerja ekonomi	Rp 2.850.000	-
160	Pengadaan printer	Canon	2015		3	3	0	0	Ruang kerja sekretariat, Ruang kerja SDA&TTG, Ruang kerja ekonomi	Rp 5.205.000	-
161	Sound System Set	-	2015		1	1	0	0	Ruang Aula	Rp 9.875.000	-
162	Kursi Kerja Pejabat	Manager Daichi Oscar Hitam	2015	Buah	6	6	0	0	Manager Daichi Oscar Hitam	Rp 5.925.000	-



NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			NILAI	KET	
						FISIK ADA					LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
163	Lemari Buku	-	2015	Buah	1	1	0	0	-	Rp 2.600.000	
164	Gordyne	-	2015	Unit	1	1	0	0	-	Rp 19.125.000	
165	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Vario 110 Iss Advance	2015	Unit	2	1	0	0	Vario 110 Iss Advance	Rp 31.409.000	
166	Lemari Arsip pejabat VIP	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang tengah	Rp 1.420.000	
167	Printer	CANON	2016	Unit	3	3	0	0	Sekretariat	Rp 5.400.000	
168	CPU	Dasumba	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 2.600.000	
169	Notebook	Asus	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 9.875.000	
170	Handycam	SONY	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 5.425.000	
171	CAMERA DIGITAL	SONY	2016	Unit	1	1	0	0	Sekretariat	Rp 4.375.000	

NO	NAMA BARANG	MERK /ALAMAT	TAHUN PENGADAAN	SATUAN	SALDO GUDANG	HASIL INVENTARISASI/VALIDASI FISIK			LOKASI BARANG (RUANGAN) <sup>1</sup>	N I L A I	KET
						FISIK ADA					
						B	RR	RB			
1	2	3	9	11	12	13	14	15	16	17	18
172	kursi Kerja Pejabat	Daichi	2016	Unit	2	2	0	0	Sekretaris	Rp 4.000.000	
173	Sofa	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala Bapemas	Rp 5.000.000	
174	Karpet	-	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Kepala Bapemas	Rp 2.945.000	
175	AC power standing	Daikin	2016	Unit	1	1	0	0	Ruang Aula	Rp 21.000.000	
										<b>Rp 1.255.271.560</b>	

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	Nilai Keswadayaan Masyarakat	-	-	-	3.114.027.788	3.269.730.000	3.433.210.000	3.604.870.000		3.231.611.150	3.269.742.850	3.398.878.600	3.601.918.100		103	100	99	99	
	Jumlah LPM berprestasi				1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100
	Jumlah PKK Aktif				186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	100	100	100	100	100
	Jumlah Posyandu Aktif	-	-	-	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	100	100	100	100	100
	Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100

Dari Tabel diatas Indikator yang mencapai target adalah :

**a. Nilai Keswadayaan Masyarakat**

Nilai keswadayaan masyarakat dari tahun ke tahun melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan.

**b. Jumlah LPM Berprestasi**

Jumlah LPM berprestasi memenuhi target yang ditentukan. Hal ini selain menunjukkan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dan potensial, juga dukungan masyarakat terhadap keberadaan lembaga tersebut serta pembinaan yang insentif oleh pemerintah daerah terhadap lembaga tersebut. Harapannya jumlah lembaga pemberdayaan terus meningkat dan sanggup menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

**c. Jumlah PKK Aktif dan Posyandu Aktif**

Jumlah PKK aktif dan Posyandu aktif memenuhi target yang ditentukan. Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Hal ini selain menunjukkan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang organisasi dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan cukup positif. Namun perlu perhatian lebih lanjut agar penambahan jumlah posyandu dari tahun ke tahun bisa terus meningkat sehingga kesehatan masyarakat dan taraf hidup sehat masyarakat terus meningkat.

**d. Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat**

Jumlah program pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Karena itu kedepan perlu adanya inovasi baru dalam program dan kegiatan pemberdayaan dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.

**Tabel 2.5**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Kelembagaan Masyarakat Pedesaan</b>																	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	972.146.100	701.214.500	151.596.500	514.941.500	400.000.000	864.616.400	585.041.209	97.145.000	484.179.570	368.808.448	88,94	83,43	64,08	94,03	92,20		
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat	149.895.000	250.000.000	250.000.000	96.571.000	219.900.000	148.165.000	248.254.900	248.254.900	88.509.567	216.676.421	98,85	99,30	99,30	91,65	98,53		
Kegiatan Pengembangan Labsite	6.339.000	8.500.000	-	-	-	6.089.000	3.525.000	-	-	-	96,06	41,47	-	-	-		
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	21.319.500	32.571.500	30.000.000	34.500.000	40.000.000	21.259.500	27.003.300	25.814.000	28.479.775	34.550.348	99,72	82,90	86,05	82,55	86,38		
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	268.605.000	200.850.000	100.000.000	100.000.000	-	258.527.000	199.051.750	92.315.225	85.806.396	-	96,25	99,10	92,32	85,81		

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	156.686.400	224.375.000	223.000.000	404.650.000	250.000.000	154.273.200	219.530.200	195.009.000	377.176.640	242.797.816	98,46	97,84	87,45	93,21	97,12		
<b>Program pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna</b>																	
Fasilitasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (P3SDA)	55.930.000	29.359.900	82.100.000	75.000.000	75.000.000	52.495.000	28.269.900	77.235.700	64.906.132	65.828.985	93,86	96,29	94,08	86,54	87,77		
Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa	46.495.500	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	45.685.500	-	43.506.500	41.443.264	41.657.000	98,26	-	87,01	82,89	83,31		
Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Sarana Prasarana	-	-	5.000.000	49.990.000	8.491.060.000	-	-	4.834.900	43.004.082	8.363.004.317	-	-	96,70	86,03	98,49		
Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	-	54.994.000	95.500.000	49.999.000	80.000.000	-	44.072.200	89.423.600	44.546.384	735.844.999	-	80,14	93,64	89,09	919,81		

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Program Peningkatan keberdayaan masyarakat desa	71.802.500	187.343.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000	71.172.500	173.866.400	36.157.500	72.108.500	73.584.499	99,12	92,81	90,39	96,14	98,11		
Teknologi Tepat Guna (TTG)	147.390.000	225.205.000	171.500.000	119.465.000	100.000.000	145.795.000	197.950.000	129.781.422	107.967.091	96.852.500	98,92	87,90	75,67	90,38	96,85		
Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa	4.905.243.000	5.392.650.000	5.993.320.000	749.880.000	1.623.740.000	4.547.024.000	3.652.294.500	5.406.591.000	626.062.500	1.507.606.700	92,70	67,73	90,21	83,49	92,85		
<b>Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa</b>																	
Pembinaan Administrasi Desa	-	-	-	59.925.000	106.294.900	-	-	-	47.956.200	98.495.676	-	-	-	80,03	92,66		
Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD	-	-	-	96.875.000	155.441.000	-	-	-	63.416.150	154.563.760	-	-	-	65,46	99,44		
Pemantapan Aparatur Desa	-	-	-	887.450.000	150.000.000	-	-	-	858.705.250	149.545.335	-	-	-	96,76	99,70		
Persertifikatan tanah kas desa	-	-	-	99.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Evaluasi dan Monitoring Pilkades	-	-	-	537.300.000	-	-	-	-	446.401.450	-	-	-	-	83,08	-		

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perlombaan Desa dan Kelurahan	97.671.000	124.025.000	91.392.500	122.088.500	150.000.000	93.596.000	115.891.000	77.512.750	118.101.190	141.681.134	95,83	93,44	84,81	96,73	94,45		
Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan	89.695.000	150.000.000	130.170.000	150.400.000	100.000.000	88.755.200	146.570.000	127.660.750	147.252.602	86.889.459	98,95	97,71	98,07	97,91	86,89		
<b>Program pembinaan dan fasilitas pembangunan desa</b>																	
Bimbingan dan fasilitasi pengelolaan APBDes	-	-	-	400.400.000	862.100.000	-	-	-	390.231.241	822.760.734	-	-	-	97,46	95,44		
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	-	-	-	444.400.000	150.000.000	-	-	-	374.592.768	140.073.401	-	-	-	84,29	93,38		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (sosialisasi pengelolaan keuangan desa)	-	-	-	1.152.000.000	1.228.500.000	-	-	-	1.117.327.326	1.160.834.444	-	-	-	96,99	94,49		



PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</b>																	
Pembinaan PKK	847.450.000	861.009.000	626.130.000	701.650.000	800.400.000	781.435.000	710.608.906	582.234.380	658.343.160	738.899.935	92,21	82,53	92,99	93,83	92,32		

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Capaian Kinerja Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata – rata mencapai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 90%
- b. Pada Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat tidak tercapainya target dikarenakan tidak ada kejelasan program dari propinsi, sehingga dana BOP dikembalikan pada Daerah. Yang terserap hanya pembiayaan monitoring pra kegiatan dalam menentukan lokasi.
- c. Pada kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak dana BOP tidak terealisasi karena dana sharing dari propinsi batal diluncurkan di daerah

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dengan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat, terutama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah tindak lanjut dengan program kegiatan yang bersifat partisipatoris. berkenaan dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan, saat ini pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan sebagaimana disepakati dalam “Millennium Goals” atau “Millennium Development Goals” (MDG). Millenium Development Goals (MDG) adalah sebuah paket target pembangunan yang menjadi tujuan bersama seluruh anggota UN untuk menjadikan dunia ini lebih baik bagi semua orang. MDG tersebut merupakan hasil kesepakatan antar kepala negara anggota UN di dalam forum WSSD (World Summit for Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002. Perumusan MDG merupakan tindak-lanjut dari UN Millenium Declaration yang dihasilkan pada World Summit di New York pada tahun 2000. dan Indonesia adalah salah satu Negara yang terlibat di dalamnya. Tujuan-tujuan pembangunan di dalam MDG tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tujuan besar (*goals*), yaitu: (1) Menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal. (3) Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. (4) Menurunkan kematian bayi. (5) Meningkatkan kesehatan ibu. (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit yang lain. (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan. (8) Menjalin kerjasama global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan besar itu kemudian dikelompokkan dalam tiga arah kebijakan fiscal yakni; program *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment*.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jika dirinci berdasarkan target MDGs itulah, maka Sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2011, yaitu Pro-Growth, Pro job, Pro-Poor dan Pro Environment maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang perlu ditingkatkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pada *Program Proo Poor* (indicator kinerja program yang berpihak pada masyarakat miskin) kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Kawasan
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
4. PNPM-Mandiri Perdesaan
5. Jaringan Listrik Desa

Pada *Program Pro Growth* (kegiatan dengan indicator berpihak pada pertumbuhan ekonomi) meliputi:

1. Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)
2. Pembangunan Sistem Managemen Partisipatif (SMPP)
3. Usaha Ekonomi Desa (UED)
4. Program Pengembangan Sumber Daya Lokal berbasis Kawasan (P2SLBK)
5. Pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tabel 2.4

**KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG  
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN / KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
1	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		
	Nilai Keswadayaan Masyarakat			Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan
	Jumlah PKK Aktif			Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
	Jumlah Posyandu Aktif			Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

#### **2.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW**

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan rencana pengelolaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTWR propinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah berjuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan DPMD tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi Pelayanan DPMD.

#### **2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS**

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan ( *Evidence Based* ) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik SKPD. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan mengetahui kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya organisasi, Sebuah organisasi dapat memetakan kekuatan dan kelemahan, sekaligus juga dapat mengetahui peluang dan ancaman. Dengan pemetaan yang demikian organisasi dapat merencanakan dengan baik apa yang hendak dicapai di masa depan.

Oleh karena itu menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Tujuannya agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/ tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat di Kabupaten Sampang.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ **Analisis SWOT** ” ( *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* ). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu SKPD dalam melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal.

Adapun empat unsur *strengths, weakness, oppurtunities, threats* yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem

informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh SKPD. Faktor internal akan memberikan kekuatan ( *sthrenghts* ) dan kelemahan ( *weakness* ) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

**a. Kekuatan ( *Sthrenghts* )**

Faktor-faktor kekuatan internal yang mendorong kepada kemajuan dan kelancaran adalah:

1. Terbentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2. Adanya Dukungan Dana dari Pemerintah Daerah
3. Masih banyaknya Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Sampang yang perlu Penanganan dan dapat diberdayakan.
4. Adanya program dan kegiatan pemberdayaan yang sudah dikenal masyarakat
5. Adanya dukungan dan koordinasi antar bidang yang ada
6. Banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Sampang yang mana SDM sangat rendah kebanyakan berada di Pedesaan
7. Adanya Kerjasama Antar SKPD di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

**b. Kelemahan ( *Weakness* )**

Berdasarkan hasil analisa internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa kelemahan yang yang dapat menghambat kelancaran dalam mencapai tujuan diantaranya :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat masih kurang;
2. Dana Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terbatas
3. Seringkali Kegiatan Pemberdayaan berhenti pada pendekatan repressif, seperti sekedar memberikan dana hibah pengelolaan keuangan pada UPKu tanpa ada kontinuitas kegiatan.
4. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat di bidang Pemberdayaan Masyarakat masih kurang, terutama tenaga fungsional pemberdayaan masyarakat
5. Lapangan Kerja di Kabupaten Sampang terbatas karena belum ada Perusahaan menengah keatas
6. Minimnya Tenaga ahli/Instruktur dalam pemberdayaan masyarakat
7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan yang dimiliki

## 2. Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor – faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “ peluang “ ( *opportunities* ) tapi juga memunculkan “ tantangan “ ( *threats* ). Adapun faktor eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

### a. Peluang ( *Opportunities* )

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Lembaga Sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
2. Adanya partisipasi/kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
3. Adanya Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Hampir Miskin yang potensial dan bisa diberdayakan
4. Telah selesainya bangunan Jembatan Suramadu
5. Pertumbuhan Industri yang semakin berkembang sehingga membuka peluang untuk membuka usaha.
6. Terbukanya kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pelatihan pemberdayaan
7. Adanya Peran kemitraan antar stakeholders pembangunan untuk melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat..
8. Adanya Kerjasama Antar Daerah melalui Bakorwil IV Pamekasan dalam upaya pemberdayaan Masyarakat

### b. Tantangan ( *Threats* )

Tantangan adalah yang dapat menghambat kepada keberhasilan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang
2. Rendahnya partisipasi perempuan di perdesaan dalam mendukung pembangunan



3. Tingkat pengetahuan teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
4. Peran kemitraan antar stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih lemah
5. Masih tingginya ego sektoral antar SKPD yang menghambat kemitraan pemberdayaan masyarakat

**Tabel 3.1**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

ASPEK KAJIAN		CAPAIAN / KONDISI SAAT INI		STANDAR YANG DIGUNAKAN		FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD			
						INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)				
1		2		3		4		5		6	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	1	Kompleksitas permasalahan Pemberdayaan Masyarakat pada penanggulangan kemiskinan ke dalam isu strategis, yaitu masih tingginya angka kemiskinan, Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan partisipatoris, peran kemitraan masih lemah, tingginya ego sektoral antar SKPD	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Perlu adanya peningkatan pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang pemberdayaan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat	1	Perlu adanya peran serta masyarakat melalui kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pemberdayaan masyarakat dan diharapkan yang lebih terarah, partisipatif untuk hasil yang optimal	1	Cakupan atau jangkauan pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan	
2	Upaya peningkatan kualitas masyarakat yang mandiri dan berdaya	2	Peningkatan kualitas masyarakat yang telah ditempuh dengan pelatihan pengelolaan keuangan pokmas, ketrampilan mengolah sumber daya alam, memaksimalkan pengelolaan teknologi tepat guna, peningkatan sumber usaha ekonomi antar desa bagi pencari kerja, dan kualitas pokmas	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan dan program secara kuantitas dan kualitas masih belum dimanfaatkan dengan baik, seperti bantuan hibah dan dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sehingga pelaksanaan program masih jauh dari yang diharapkan (belum optimal)	2	Kualitas sumberdaya manusia di perdesaan yang rendah dan minimnya akses infrastruktur ke desa sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya percepatan penanggulangan kemiskinan	2	Sumberdaya manusia/pegawai belum mampu optimal dalam pelaksanaan pelayanan program pemberdayaan masyarakat, disebabkan tidak adanya tenaga fungsional yang mumpuni.	

Upaya penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan Kualitas ekonomi masyarakat dengan konsep pemberdayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan dana, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang terbatas serta dukungan dari masyarakat yang sangat minim. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengadakan sosialisasi secara berkala, dan pendampingan pemberdayaan pada pokmas yang ada di masyarakat.

**Tabel 3.2**  
**IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS ( LINGKUNGAN EKSTERNAL)**  
**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

NO	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL (LOKAL)	LAIN - LAIN
1	2	3	4	5
1	Kemiskinan	Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Lembaga Sosial dalam Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Anggapan masalah kemiskinan adalah takdir	
2	Pengangguran			
3	Rendahnya tingkat pendidikan Masyarakat			
4	Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan;	Adanya partisipasi atau kepedulian masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Dana Program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terbatas	
5	Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas;			
6	Lemahnya pengembangan wilayah antar desa dalam upaya menumbuhkan usaha ekonomi produktif antar desa	Keinginan yang kuat dari berbagai pihak agar masyarakat miskin berdaya dan memiliki usaha ekonomi produktif dan penguatan pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya	Pokmas, RTSM dan BUMDes setelah mendapatkan program dan kegiatan pemberdayaan tak dapat melaksanakan dengan baik	
7	Rendahnya kualitas SDM aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa			

Tingginya perhatian Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan kurang diimbangi dengan ketersediaan dana yang mencukupi. Disamping itu juga rendahnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian serius.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### a. Visi Kabupaten Sampang

Visi Kabupaten Sampang periode Tahun 2019-2024 adalah ***“Sampang Hebat Bermartabat”***

#### b. Misi Kabupaten Sampang :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
- e. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Sinkronisasi visi dan misi Kabupaten Sampang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terletak pada misi kedua, yaitu; **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan misi keempat, yaitu : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

**Tabel 3.3**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN SAMPANG**

<i>Visi : Mewujudkan Sistem Birokrasi yang Sehat, Masyarakat Yang Kuat, Lingkungan Yang Bersahabat, Demi Terciptanya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat</i>				
NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	MISI 2: <b>“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”</b>	Cakupan atau jangkauan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masih sangat terbatas terhadap penanggulangan kemiskinan	Program pemberdayaan masyarakat miskin yang ada masih tumpang tindih, umumnya menerima tambahan bantuan melalui program lainnya	Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan lemahnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas / masyarakat, seperti Pokmas, Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), BUMDes, UPKu,
1	MISI 1 : <b>“Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”</b>	Sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa sangat terbatas terhadap perkembangan desa mandiri di perdesaan	Program pemberdayaan masyarakat miskin yang ada masih tumpang tindih, umumnya menerima tambahan bantuan melalui program lainnya	Adanya potensi dan sumber dana berupa DD/ADD mengatasi permasalahan minimnya kapabilitas sumber daya manusia di perdesaan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Program peningkatan peran perempuan di Pedesaan			

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/ lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL).

Guna terwujudnya sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah penting kiranya jika Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Sampang terpilih, maka visi dan misi Renstra Kabupaten Sampang mendukung Renstra Kementerian Dalam Negeri point 7 (tujuh), yaitu: mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator kinerja program meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pembangunan yang partisipatif dan demokratis.

**Tabel 3.4**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT**  
**DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA**

No	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5

1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya	Tingginya angka kemiskinan	Lemahnya dukungan masyarakat terhadap program pembangunan	Tingginya keinginan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga
2	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya tenaga fungsional pemberdayaan masyarakat	Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk membina masyarakat miskin yang berdaya	Tumbuhnya keinginan masyarakat untuk mandiri
3	Peningkatan Pembangunan yang partisipatif dan Demokratis	Lemahnya kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan	Tidak adanya kontinuitas program kegiatan pemberdayaan	Terdapat program kegiatan lintas sektor yang berbasis pemberdayaan

Sasaran Renstra K/L yaitu : Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya, Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, dan peningkatan pembangunan yang partisipatif dan demokratis. Ketiga sasaran renstra K/L untuk menjawab permasalahan mengenai lemahnya kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, masih tingginya angka kemiskinan di daerah dan minimnya tenaga fungsional pemberdayaan masyarakat.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD baik Internal dan Eksternal yaitu :

- a. Faktor Internal yaitu Perlu adanya peningkatan pengelolaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi mikro dan badan usaha milik desa serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pula perlu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan dan program secara kuantitas dan kualitas masih belum dimanfaatkan dengan baik, seperti bantuan hibah dan dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sehingga pelaksanaan program masih jauh dari yang diharapkan (belum optimal)
- b. Faktor Eksternal yaitu Perlu adanya peran serta masyarakat melalui kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pemberdayaan masyarakat dan diharapkan yang lebih terarah, partisipatif untuk hasil yang optimal serta Kualitas sumberdaya manusia di perdesaan yang rendah dan minimnya akses infrastruktur ke desa sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana dan sarana dan prasarana ) untuk keberhasilan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
***Pelayanan program Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan empat pilar; pro poor(penanggulangan kemiskinan), pro growth (pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat), pro environmet (pemberdayaan berbasis lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna), dan Pro Job (meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat)***
2. Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana sarana dan prasarana ) dengan dukungan lintas sektoral dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
***Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa***
3. Optimasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dengan pengembangan peluang kerjasama (MOU) dengan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Legislatif.  
***Penyelenggaraan dan pengembangan inovasi program Pemberdayaan Masyarakat***



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, visi Kabupaten Sampang untuk tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat dua misi yang diemban Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi 2: **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** serta Misi 4, yaitu: **“Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

Adapun untuk memenuhi misi kedua dan keempat Kabupaten Sampang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang menetapkan tujuan sebagai berikut :

##### 1) TUJUAN

- **Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Desa**
- **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

##### 2) SASARAN

Sasaran (*objective*) dalam pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama jangka

menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

**Tabel 4.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju/Mandiri	0,59	0,61	0,64	0,67	0,69
2	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD**

##### **A. Strategi :**

1. Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat demi terbentuknya desa mandiri.
2. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, diskusi publik dan masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan
3. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Memotivasi aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-prrogram pemberdayaan masyarakat.
5. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait.
6. Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada peran pemerintah.

##### **B. Arah Kebijakan**

1. Pemberdayaaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah, dilakukan Pembinaan, Pelatihan dan keterampilan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat di Desa/Kelurahan dengan revitalisasi dan optimalisasi usaha ekonomi desa.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan diharapkan akan mampu memperkuat institusi pemerintah kabupaten. Penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  
Dengan demikian diharapkan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah mendapat dukungan dan rasa kepemilikan dari masyarakat baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan.

3. Pemberdayaan pemerintahan desa diarah kepada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dalam pengambilan keputusan, Mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna pengembangan usahanya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan peluang dan potensi teknologi tepat guna yang tersedia, baik yang ditemukan oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>						
T.2	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	IT.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Menedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.	Pembinaan, Pelatihan keterampilan, dan meningkatkan Partisipasi masyarakat.	DPMD
S.9	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	IS.12	Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju dan Mandiri			
<b>Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>						
T.4	<b>Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>	IT.8	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Memotivasi aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait	Pemberdayaan pemerintahan desa diarah kepada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dalam pengambilan keputusan.	DPMD
S.17	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa	IS.27	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu			

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka yang harus dilakukan adalah mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh DPMD sebagai sebuah Organisasi. Dengan mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi maka kita akan mengetahui juga kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Organisasi.

Setelah Tahap Selanjutnya adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan DPMD Kabupaten Sampang, dua factor tersebut adalah factor lingkungan internal dan factor lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

#### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (*strength*) faktor kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat untuk terlaksananya organisasi dengan baik dan benar. Kondisi lingkungan internal ini terdiri dari 2 faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumberdaya, keterampilan atau kemampuan lainnya terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayaninya oleh organisasi itu. Dengan kata lain kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan lainnya yang secara serius menghambat kinerja efektifitas organisasi.

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi karena sangat berpengaruh dan menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dalam arti mempunyai kompetensi pendidikan yang relevan untuk melaksanakan tugasnya, baik pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional serta memenuhi persyaratan jabatan lainnya. Adapun mengenai jumlah pegawai pada DPMD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebanyak 31 pegawai. Dengan melihat jumlah pegawai yang ada ini diharapkan

sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting, karena pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan atau mewujudkan kemampuan aparatur dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

#### **b. Sarana / Prasarana**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor dan sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya. Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi penyelenggaraan tugas Dipenda mutlak diperlukan. Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud.

#### **c. Dukungan Dana**

Agar dapat terselenggaranya secara optimal berbagai kegiatan yang menjadi lingkup bidang tugas Dispenda tentu saja tidak terlepas dari dukungan dana atau biaya operasional yang tersedia dalam APBD Kabupaten Sampang. Dengan melihat mekanisme perubahan anggaran yang ada, maka secara legalitas formal DPMD bisa dikatakan memiliki kekuatan formal untuk melakukan peningkatan anggaran agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Secara umum alokasi dana belanja tidak langsung dan belanja langsung dipergunakan untuk menunjang Pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

#### **d. Informasi**

Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya. DPMD Kabupaten Sampang sebagai instansi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus didukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertikal, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Tabel 5.2**

**PENENTUAN ALTERNATIF STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN :  
KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PROGRAM  
PEMBERDAYAAN**

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Peluang :</b>	<b>Tantangan:</b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Lembaga Sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah</li> <li>2. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan</li> <li>3. Adanya Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Hampir Miskin yang potensial dan bisa diberdayakan</li> <li>4. Terbukanya kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pelatihan pemberdayaan</li> <li>5. Adanya Peran kemitraan antar stakeholders pembangunan untuk melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat.</li> <li>6. Adanya Kerjasama Antar Daerah melalui Bakorwil IV Pamekasan dalam upaya pemberdayaan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang</li> <li>2. Rendahnya partisipasi perempuan di perdesaan dalam mendukung pembangunan</li> <li>3. Tingkat pengetahuan teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah;</li> <li>4. Peran kemitraan antar stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih lemah</li> <li>5. Masih tingginya ego sektoral antar SKPD yang menghambat kemitraan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>



<b>Kekuatan :</b>	<b>Alternatif Strategi :</b>	<b>Alternatif Strategi :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah</li> <li>2. Adanya Dukungan Dana dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Masih banyaknya Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Sampang yang perlu Penanganan dan dapat diberdayakan.</li> <li>4. Adanya program dan kegiatan pemberdayaan yang sudah dikenal masyarakat</li> <li>5. Adanya dukungan dan koordinasi antar bidang yang ada</li> <li>6. Banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Sampang yang mana SDM sangat rendah kebanyakan berada di Pedesaan</li> <li>7. Adanya Kerjasama Antar SKPD di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</li> <li>2. Meningkatkan sistem pemetaan rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin sebagai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Perluasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Peningkatan pelatihan dan pendampingan pemberdayaan pada kelompok masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan pada pokmas, UPKu, BKAD dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan peningkatan ekonomi</li> </ol>
<b>Kelemahan:</b>	<b>Alternatif Strategi :</b>	<b>Alternatif Strategi :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat masih kurang;</li> <li>2. Dana Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terbatas</li> <li>3. Seringkali Kegiatan Pemberdayaan berhenti pada pendekatan repressif, seperti sekedar memberikan dana hibah pengelolaan keuangan pada UPKu tanpa ada kontinuitas kegiatan.</li> <li>4. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat di bidang Pemberdayaan Masyarakat masih kurang, terutama tenaga fungsional pemberdayaan masyarakat</li> <li>5. Lapangan Kerja di Kabupaten Sampang terbatas karena belum ada Perusahaan menengah keatas</li> <li>6. Minimnya Tenaga ahli/Instruktur dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan yang dimiliki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan optimal tanpa adanya bantuan dari Pemerintah</li> <li>2. Perlu dibangun sarana dan prasaran yang memadai untuk pelatihan dan pendampingan pemberdayaan</li> <li>3. Adanya sosialisasi program kegiatan pemberdayaan</li> <li>4. Perlu koordinasi antar desa dan antar SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengentasan terhadap kemiskinan</li> <li>2. Adanya pendataan terhadap Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Sangat Miskin</li> <li>3. Dapat mandiri dengan penguatan sumber ekonomi kreatif</li> <li>4. Perlu adanya kerjasama dengan investor dalam optimalisasi program kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Sampang</li> </ol>

**Tabel 5.3**  
**PENENTUAN STRATEGI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
<b>Pencapaian Indikator Sasaran: Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju/Mandiri</b>			
1.	Meningkatkan kelembagaan masyarakat perdesaan nya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masyarakat (LPM)	Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian lembaga masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan peran serta kelompok perempuan di perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan
2.	Meningkatkan PEMBERDAYAAN EKONOMI	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memiliki AD/ART dan memiliki SK Kepala Desa	Meningkatnya kemampuan desa dalam membentuk BUMDesa dan pengelolaan BUMDesa demi menunjang desa mandiri dalam pengelolaan pemerintahan desa
<b>Pencapaian Indikator Sasaran: Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu</b>			
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan aparatur desa	Persentase desa dengan aparatur desa berkompetensi baik	Meningkatnya kemampuan aparatur desa agar lebih kompeten dalam pengelolaan pemerintahan desa dan administrasi desa
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang baik	Meningkatkan penatakelolaan aset desa
5	Meningkatkan pembinaan dalam pengelolaan pembangunan desa	Persentase desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik	Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memanagerial keuangan dan pembangunan kawasan
		Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang baik	Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan mengelola APBDes

**Tabel 5.4**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI : Menuju Sampang Hebat Bermartabat</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>			
<b>MISI 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Pengelolaan Pemerintah Desa	Meningkatnya program Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, diskusi publik dan masyarakat dalam menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya memperkuat institusi pemerintah kabupaten. Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan berdaya

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik personel (Sumber Daya Manusia) maupun dana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya guna mendukung keberhasilan pembangunan terutama dalam penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemandirian masyarakat, memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan (paradigma) pemberdayaan.

Untuk itu sebagaimana diamanatkan dalam tujuan renstra (rencana strategis), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang kemudian menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan kerja (sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ).

#### 6.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terdiri dari 7 Program dan 20 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **I. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran**

1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah

##### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor
2. Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

##### **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

##### **IV. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik**

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

##### **V. Program Kelembagaan Masyarakat Perdesaan**

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

2. Pemberdayaan lembaga Tradisi Masyarakat
3. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat

**VI. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna**

1. Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

**VII. Program Bina Pemerintahan Desa**

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
2. Peningkatan Perencanaan, pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
3. Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Aset Desa
4. Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa

**6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :





Sasaran RPJMD /Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2	Pengembangan sarana dan prasarana desa		Jumlah jalan non status dan jembatan non status yang akan dibangun di desa	Unit	40	23,00	3.595.350.000	22,00	3.332.785.680	20,00	3.367.580.743	20,00	3.395.738.638	20,00	3.414.262.849	20,00	3.433.156.892	125,00	20.538.874.802
			Jumlah listrik gratis bagi RTSM	RTSM	1500	3000,00		5000,00		5000,00		5000,00		5000,00		5000,00		2800,00	
			Jumlah UPKu dan BKAD yang akan dibina	BKAD/UPKu	5	5		5		5		5		5		5		30,00	
3	Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan		Jumlah pameran TTG nasional yang diikuti	TTG	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	600.000.000
<b>S.19</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa</b>	<b>IS.36</b>	<b>Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu</b>	%	<b>55,56</b>	66,67	2.301.810.000	77,78	2.180.274.525	100,00	2.522.545.564	100,00	2.779.396.091	100,00	3.161.345.306	100,00	3.564.838.057	100,00	16.510.209.543
a.	Program Bina Pemerintahan Desa	1	Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik	%	55,56	66,67		77,78		100		100		100		100		100	









## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan alat ukur yang jelas guna menilai keberhasilan sebuah organisasi. Karena itu diperlukan indikator kinerja dalam SKPD guna menunjang keberhasilan pembangunan yang tertuang dalam sasaran RPJMD. Berkenaan dengan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan indikator kinerja selama lima tahun.

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun dalam menunjang sasaran RPMD adalah sebagai berikut :

1. Indek Desa Membangun (IDM)
2. Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik



Program Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah dengan cara melakukan Pembinaan, Pelatihan dan keterampilan untuk penguatan usaha ekonomi masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat secara mandiri dan partisipatif mendukung gerak pembangunan demi terwujudnya desa mandiri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1) *Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa (Indikator Renstra SKPD)*

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diarah kepada partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, baik dalam pengambilan keputusan, Mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan prtisipatif. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

2) *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa*

Kedua indikator di atas dirumuskan untuk menunjang program pembangunan Kabupaten Sampang dan sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, rencana strategis disusun berdasarkan kebutuhan Pendanaan Indikatif dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Sampang periode 2019 – 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disamping itu, Rencana strategis ini juga menjadi bahan acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ).

Dengan tersusunnya Rencana Strategis 2019 – 2024 maka telah jelas dijabarkan arah Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun ke depan. Hal tersebut akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dimasa sekarang dan akan datang. Untuk itu Rencana Strategi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan dan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa depan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Renstra ini sesuai dengan sifatnya, terbuka untuk direvisi sejalan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sampang dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan dan pencapaian hasil – hasil pembangunan di Kabupaten Sampang secara keseluruhan. Akhir kata semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sampang, Juni 2019

**BUPATI SAMPANG**

ttd

**H. SLAMET JUNAIDI**